

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Faisal. "Jalan Terjal *Good Governance* Prinsip, Konsep & Tantangan Dalam Negara Hukum." Makassar: Puka, 2009.
- Addink, G.H, G. Anthony, A.C. Buyse & C. Flinterman (eds.), *Human Rights and Good Governance*. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2010.
- Addink, Henk. *Good Governance: Concept and Context*. (Oxford: Oxford University Press, 2019).
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Hadjon, P. M. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Maschab. Mashuri. "Politik Pemerintahan Desa di Indonesia." Yogyakarta: PolGov, 2013.
- Nurcholis, Hanif. "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Jakarta: Erlangga, 2011.
- Peter Baehr. "Instrumen Internasional Pokok HAM". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Soeprapto, Maria, Farida, Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)", Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Sudjatmiko, Budiman., dan Zakaria, Yando. "Desa Kuat, Indonesia Hebat!." Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Jurnal Online

- Adhinata, Bayu, I. Ketut Darma, and Ni Wayan Sirimiati. "Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government." *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora* 10, no. 3 (2020): 334-344. Diakses pada 4 Mei 2025. <http://dx.doi.org/10.31940/soshum.v10i3.2015>.

- Adiputra, I. Made Pradana, Sidharta Utama, and Hilda Rossieta. "Transparency of Local Government in Indonesia." *Asian Journal of Accounting Research* 3, no. 1 (2018): 123-138. Diakses pada 19 Mei 2025. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>.
- Afnan, Dikhorir. "Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Soshum Insentif* (2019): 153-163. Diakses pada 12 Juni 2025. <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i2.135>.
- Aminudin, Achmad. "Implementation of Good Village Governance in Village Development." *Journal of Public Administration and Local Governance* 3, no. 1 (2019): 1-17. Diakses pada 5 Mei 2025. <http://dx.doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356>.
- Eko, Sutoro. "Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi." *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (2003): 257-294. Diakses pada 1 Mei 2025.
- Elahi, K. Q. I Elahi, Khandakar Qudrat-I. "UNDP on Good Governance." *International Journal of Social Economics* 36, no. 12 (2009): 1167-1180. <https://doi.org/10.1108/03068290910996981>.
- Erowati, Eti Mul. "Supremasi Hukum dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan." *Prosiding* (2018). Diakses pada 20 April 2025.
- Fait, Taslim, Anis Ribcalia Septiana, and Rustam Tohopi. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka)." *Jurnal Administrasi Negara* 9, no. 1 (2021): 102-114. Diakses pada 1 Mei 2025. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>.
- Fanani, Abdul Fatah, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, & Suprpto Suprpto. "Analisis Undang-Undang Desa." *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2019): 1-14. Diakses pada 2 Mei 2025. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i1.280>.
- Fitriyah, L. "Dampak Disinformasi dalam Era Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Komunikasi dan Informasi Publik* 3, no. 2, (2019): 91–105. Diakses pada 19 Mei 2025. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>.
- Kennedy, Alexander, William Hartato Surya, Syilfia Regita Mustika, dan Fransiscus Xaverius Wartoyo. "Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance di Indonesia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 558-569. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.654>.

- Lubis, Muharman, Tien Fabrianti Kusumasari, and Lukmanul Hakim. "The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses." *International Journal of Electrical and Computer Engineering* 8, no. 1 (2018): 94. Diakses pada 9 Mei 2025. <https://doi.org/10.11591/ijece.v8i1.pp94-103>.
- Malik, Ihyani. "Government Effectiveness and Good Governance Index: The Case of Indonesia." *Journal of Governance* 9, no. 1 (2024): 106-126. Diakses pada 19 Mei 2025. <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v9i1.23787>.
- Nesthy Kheren Nadia, dkk, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)," *Jurnal Komunikatio ISSN 2442-3882 Vol. 8*, no. 2 (2022): 29-42. Diakses pada 6 Mei 2025. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.60>.
- Nugroho, R., "Keseimbangan antara Transparansi dan Efektivitas Pemerintahan." *Jurnal Administrasi Negara* 16, no. 1, (2018): 23–37. Diakses pada 20 Mei 2025. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i1.5667>.
- Ratnawati, D, "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah." *Jurnal Administrasi Publik* 17, no. 2,(2022): 45–55. Diakses pada 19 Mei 2025. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>.
- Ratnawati, D. "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah." *Jurnal Administrasi Publik* 17, no. 2, (2022): 45–55. Diakses pada 17 Mei 2025. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>.
- Retnowati, Endang. "Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance* (antara *das sein* dan *das sollen*)." *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 54-61. Diakses pada 15 Mei 2025. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.
- Sajangbati, Youla C. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Lex Administratum* 3, no. 2 (2015): 101-119. Diakses pada 4 Mei 2025. <https://doi.org/11.45660/jgsp.s2i2.40>.
- Suwito, A, "Risiko Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Keamanan Negara." *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional* 5, no. 1, (2020): 32–45. Diakses pada 19 Mei 2025. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>.
- Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, dan Roberia, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, no. 2 (2024): 720–728, Diakses pada 30 April 2025. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1196>.

- Syahputra, I, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan: Telaah atas Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 22, no. 1, (2018): 63–78. Diakses pada 17 Mei 2025. <https://doi.org/01.40565/spahsa.v9i1.3338>.
- Tambuwun, Fernando Victory, Harijanto Sabijono, & Stanly W. Alexander. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 04 (2018). Diakses pada 4 Mei 2025. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>.
- Wahyudi, E. "Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 211–230. Diakses pada 19 Mei 2025. <https://doi.org/00.30414/sawala.v3i1.4448>.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik sebagai upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–234. Diakses pada 22 April 2025. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>.
- Zitri, Ilham, Rifaid Rifaid, and Yudhi Lestanata. "Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 2, no. 2 (2020): 164–190. Diakses pada 4 Mei 2025. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.60>.

Wawancara

- Wawancara, Ferry Irawan (Kepala Desa Wanutengah), 11 Juni 2025.
- Wawancara, Dedy Bahar (Sekretaris Desa Wanutengah), 10 Juni 2025.
- Wawancara, Wahyu Darmawanto (Direktur Badan Usaha Milik Des Wanutengah), 11 Juni 2025.
- Wawancara, Suat Mafudli (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wanutengah), 11 Juni 2025.

Internet

- "Desa Wanutengah, Parakan." (Website Desa, 2020). <https://wanutengah-parakan.temanggungkab.go.id/frontend/profil/110>.
- Eko Susanto, "Kades di Temanggung Ditahan, Diduga Korupsi Bankeu JatengRp. 295 Juta." (Detik, 2024). <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan->

kriminal/d-7480383/kades-di-temanggung-ditahan-diduga-korupsi-bankeu-jateng-rp-295-juta.

Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document
United Nations Development Programme (UNDP,1997).

Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pemerintahan Desa Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi." Master's thesis, Universitas Islam Indonesia, 2015.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8300>.

Mariyadi,"21 Nama Lain Desa di Indonesia." *Updesa*, 7 Mei 2025.
<https://updesa.com/nama-lain-dari-des/>

Nasrul," Kejari Temanggung Tetapkan 4 Perangkat Desa Ngadimulyo Tersangka Tipikor." (Jateng Info, 2022). <https://jatenginfo.inews.id/read/200391/kejari-temanggung-tetapkan-4-perangkat-desa-ngadimulyo-tersangka-tipikor>.

Pengelolaan Dana Desa Jadi Kasus Korupsi Terbanyak Pada 2023 (ICW, 2024).
<https://kumparan.com/kumparannews/laporan-icw-pengelolaan-dana-desa-jadi-kasus-korupsi-terbanyak-pada-2023-1xuGNzQHxVx/3>

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Negara yang Bersih.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fungsi dan Kewenangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Peraturan Kepala Desa Wanutengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Wanutengah.

LAMPIRAN

A. Surat Izin Riset dan Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM	Jalan dr. Antonius Suroyo Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275 Telepon (024) 76918201 Laman: www.fh.undip.ac.id , Pos-el: fh[at]live.undip.ac.id
Nomor :	360UN7.F1/AK/VI/2025	11 JUN 2025
Lamp. :		
Hal :	Permohonan Riset/Penelitian	
 Yth. Kepala Desa Wanutengah Desa Wanutengah, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung		
 Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.		
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:		
nama	: Didik Wuryanto Wicaksono	
NIM	: 11000118130241	
alamat	: Jl. Srandol Bumi Indah Blok G No. 8, Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang	
nomor HP	: 08121514707	
bidang minat	: Hukum Administrasi Negara	
judul skripsi	: Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Dana Desa Sebagai Upaya Mewujudkan <i>Good Village Governance</i> Di Desa Wanutengah	
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.		
 Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. NIP. 196711191993032002		

B. Balasan Surat Izin Riset dan Penelitian



KEPALA DESA WANUTENGGAH
KECAMATAN PARAKAN

Wanutengah, 12 Juni 2025

No Surat : 262/DS/VI/2025
Lamp. : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada.

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang nomor 360/UN7.F1/AK/VI/2025 tertanggal 11 Juni 2025 perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka kami Pemerintah Desa Wanutengah menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Didik Wuryanto Wicaksono
NIM : 11000118190241
Alamat : Jl. Srandol Bumi Indah Blok G No.8 RW 5, Sumurboto
Banyumanik, Kota Semarang
Nomor HP : 08121514707
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Dana
Desa Sebagai Upaya Mewujudkan Good Village Governance Di Desa Wanutengah
Bahwasannya yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di lingkungan Desa Wanutengah

Demikian Surat izin ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wanutengah, 12 Juni 2025

Kepala Desa Wanutengah



Jubug Rt 05 RW 02, Desa Wanutengah Kode Pos 56254 Telepon/Faximilie : -
Surat Elektronik: desawanutengah3@gmail.com laman : wanutengah-parakan.temanggungkab.go.id

C. Kuisisioner Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara Suat Mahfudli (BPD Wanutengah)

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana pemerintah desa menjalankan kewajiban hukum terkait keterbukaan informasi publik, khususnya soal dana desa? - Sudah di laksanakan sesuai aturan - Dana desa diumumkan lewat transparansi APBDes
2.	Bagaimana peran Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2021 dalam menyusun APBDes dan menetapkan skala prioritas program desa? - Sudah sesuai - Sudah di laksanakan sesuai skala prioritas
3.	Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa? - Sudah melibatkan semua unsur masyarakat - evaluasi lokal APBDes
4.	Bagaimana pemerintah desa menjaga keadilan dan inklusivitas informasi agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapat akses yang setara? - lewat media pengumuman di desa, sosialisasi kampung KB dan P4/P5
5.	Apakah terdapat peraturan atau kebijakan desa yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik dan dana desa? - Ada
6.	Bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pengelolaan dana desa telah mengikuti pedoman Perbup No. 82 Tahun 2021? - lewat kegiatan RT / RW - Banner "transparansi" dana yg di pasang di rumah desa dan kampung RW
7.	Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, khususnya tentang dana desa? - Keterbatasan SDM atau admin IT.
8.	Bagaimana pemerintah desa mengatasi hambatan seperti rendahnya literasi warga atau kurangnya fasilitas informasi? - Berkerja sama dg operator penyedia internet (ex: my republic)
9.	Bagaimana keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik? - Penyediaan Web desa
10.	Apakah pemerintah desa memiliki sistem evaluasi terhadap efektivitas keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan? - Ya - Baik melalui musder maupun web desa

2. Hasil Wawancara Ferry Irawan (Kepala Desa Wanutengah)

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana pemerintah desa menjalankan kewajiban hukum terkait keterbukaan informasi publik, khususnya soal dana desa? Kita melibatkan masyarakat dalam keterbukaan ya berlatar dari membuat desa berprestasi dan laporan masyarakat
2	Bagaimana peran Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2021 dalam menyusun APBDes dan menetapkan skala prioritas program desa? skala prioritas dasarnya ada di bawah ini menurut desa kebutuhan masyarakat
3	Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa? sangat terlibat melalui musdes musdes musyadi laporan kerja masyarakat
4	Bagaimana pemerintah desa menjaga keadilan dan inklusivitas informasi agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapat akses yang setara? melalui sistem informasi dan pelayanan masyarakat
5	Apakah terdapat peraturan atau kebijakan desa yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik dan dana desa? Ya ada
6	Bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pengelolaan dana desa telah mengikuti pedoman Perbup No. 82 Tahun 2021? melalui musyarah dan informasi publik baik surat maupun delikat
7	Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, khususnya tentang dana desa? memberikan informasi kepada masyarakat tentang dana desa masyarakat
8	Bagaimana pemerintah desa mengatasi hambatan seperti rendahnya literasi warga atau kurangnya fasilitas informasi? melakukan kegiatan aktif sosialisasi
9	Bagaimana keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik? sangat membantu sehingga masyarakat tahu dan memahami manfaat masyarakat
10	Apakah pemerintah desa memiliki sistem evaluasi terhadap efektivitas keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan? penyua

3. Hasil Wawancara Wahyu Darmawanto (Direktur BUMDes Wanutengah)

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana pemerintah desa menjalankan kewajiban hukum terkait keterbukaan informasi publik, khususnya soal dana desa? Dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan
2.	Bagaimana peran Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2021 dalam menyusun APBDes dan menetapkan skala prioritas program desa? Memberikan aturan prosedur
3.	Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa? Masyarakat ikut serta melalui musdes
4.	Bagaimana pemerintah desa menjaga keadilan dan inklusivitas informasi agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapat akses yang setara? Memberikan informasi transparansi yang di sampaikan melalui website, sosial media, Banner
5.	Apakah terdapat peraturan atau kebijakan desa yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik dan dana desa? ada
6.	Bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pengelolaan dana desa telah mengikuti pedoman Perbup No. 82 Tahun 2021? Melalui transparansi Anggaran (APBDes)
7.	Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, khususnya tentang dana desa? Ketidaksiapan masyarakat membaca informasi
8.	Bagaimana pemerintah desa mengatasi hambatan seperti rendahnya literasi warga atau kurangnya fasilitas informasi? Peningkatan kapasitas fasilitator dan ada tutung pambina informasi
9.	Bagaimana keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik? Memberikan informasi, umpan balik dari warga ke Pemdes
10.	Apakah pemerintah desa memiliki sistem evaluasi terhadap efektivitas keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan? kurang tahu

4. Hasil Wawancara Dedy Bahar (Sekretaris Desa Wanutengah)

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana pemerintah desa menjalankan kewajiban hukum terkait keterbukaan informasi publik, khususnya soal dana desa? Pemerintah desa melakukan publikasi baik melalui medsos desa, web desa, kalender, banner transparansi serta melalui musdes
2	Bagaimana peran Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2021 dalam menyusun APBDes dan menetapkan skala prioritas program desa? Perbup tersebut sebagai acuan dalam Peraturan Desa No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanutengah Tahun Anggaran 2021. Sedangkan di tahun 2025 Dana Desa menggunakan Perbup Nomor 11 Tahun 2025 ttg Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut Permendes PDTT No 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan dana desa Tahun 2025, dikarenakan aturan terkait prioritas Dana Desa tiap tahun berubah dan belum tentu sama dan desa Wanutengah sudah mengikuti aturan tersebut.
3	Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa? Perencanaan Perwakilan masyarakat melalui tokoh masyarakat dan Lembaga-lembaga desa diundang dalam musdes dan juga musrenbangdes, serta beberapa masuk tim penyusun RKPDes Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya masyarakat dilibatkan misal dalam kegiatan-kegiatan posyandu, ekspo desa, pelatihan-pelatihan yang pesertanya masyarakat serta pembangunan yang mana dilakukan secara swakelola yakni melibatkan masyarakat dalam proses dan pembangunannya
	Evaluasi dilaksanakan diakhir tahun dimana perwakilan masyarakat turut serta dalam peserta musdes serah terima hasil pekerjaan
4.	Bagaimana pemerintah desa menjaga keadilan dan inklusivitas informasi agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapat akses yang setara? Di era digital ini pemerintah Desa melakukan penyebaran informasi lewat web dan media social tidak hanya lewat papan pengumuman sehingga masyarakat yang aktif akan mendapat informasi dengan mudah
5.	Apakah terdapat peraturan atau kebijakan desa yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik dan dana desa? Ada yaitu Perkades No 2 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Wanutengah
6.	Bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pengelolaan dana desa telah mengikuti pedoman Perbup No. 82 Tahun 2021? Penyampaian dilakukan melalui Perwakilan masyarakat yaitu BPD, dimana sebelum penetapan perdes terkait APBDes, perdes tersebut dibahas di musdes bersama dan dilakukan persetujuan bersama BPD

7.	Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, khususnya tentang dana desa? Doi era digitalisasi ini desa sudah berupaya meningkatkan keterbukaan informasi lewat medsos dan web desa, tetapi terkendala ada sebagian warga yang tidak menggunakan medsos sehingga desa masih perlu sosialisasi langsung ke tingkat RT/Dusun
8.	Bagaimana pemerintah desa mengatasi hambatan seperti rendahnya literasi warga atau kurangnya fasilitas informasi? Desa berupaya tetap melakukan publikasi baik lewat papan pengumuman, medsos atau web desa, dan kadang diselingi lewat sosialisasi di kegiatan kemasyarakatan di tingkat RT
9.	Bagaimana keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik? Semakin mudah informasi diakses maka semakin mudah masyarakat dalam memperoleh informasi, hal ini sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat yang paham dan kritis terkait kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga kebijakan pemerintah akan menyesuaikan hal tersebut dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10.	Apakah pemerintah desa memiliki sistem evaluasi terhadap efektivitas keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan? Untuk keterbukaan informasi lewat web desa ada evaluasi tiap bulan dari kominfo. Sedangkan untuk tingkat masyarakat dilakukan uji petik beberapa warga untuk mengetahui apakah informasi telah tersalurkan dengan baik atau tidak

D. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Wanutengah



Wawancara dengan BPD dan BUMDes Wanutengah